

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI ETIKA
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

(Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)



**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Di Susun Oleh :

Masmita

Npm : 1421020131

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya adalah bahwa dalam negara demokrasi rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakan rule of law adanya pemerintahan mayoritas dan menghormati hak-hak minoritas. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum (Pemilu). Pemilu umum merupakan wujud dari kebebasan berserikat dan pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa). Tapi demokrasi juga mempunyai etika dalam cara penyampaian aspirasi hak pilih, proposional dan mengkitik pada tempatnya, sehingga tidak asal-asalan. Namun dalam praktiknya tidak mudah terselenggara karena ada *money politic*, intimidasi, petugas TPS tidak netral, merusak kertas suara, dan *ghost voter* (menggunakan hak pilih bukan atas dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih) hingga saling menjelek-jelekan.

Permasalahan yang hendak di teliti dalam skripsi ini: 1). Bagaimana implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan ? 2). Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dan ingin mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan sudah terwujud walaupun tidak sepenuhnya. Melalui demokrasi dapat memberikan kebebasan untuk berpendapat atau menyuarakan hak pilihnya tetapi demokrasi harus tetap dalam kerangka etika agar tidak jadi demokrasi yang keterlaluan. Tanpa adanya etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut akan terjadi kacau. 2). Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi nilai demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dapat dibenarkan sebab tidak terdapat hal-hal yang melanggar ajaran Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, UIN Raden Intan, Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi
Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa
(Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang
Tangkas Kabupaten Way Kanan)**

Nama : Masmita
NPM : 1421020131
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. Maimun, S.H., M.H
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II

Agustina Nurbayati, S.Ag. S.H.,
NIP. 197408162003122004

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

Drs. Susiadi As., M. Sos.I
NIP.1958081719993301002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, UIN Raden Intan, Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa** (Studi Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan) disusun oleh Masmita NPM 1421020131 Jurusan Siyasah Syar'iyah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Senin, 04-06,2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I

(
.....)


Sekretaris : Gatot Bintoro. P.AJI, M.E.Sy

(
.....)

Penguji 1 : Liky Faisal,S.Sos., M.H.

(
.....)

Penguji II :Drs. Maimun, S.H., M.A

(
.....)



DEKAN

Drs. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "... dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".(Q.S Ali-Imran : 159)¹

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah".(Q.S Al-Ahzab: 21)²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : Penerbit Diponogoro, 2010), H.71

² *Ibid*, h. 420

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT tuhan yang maha penyayang, penuh kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Hariyadi dan Neldawati tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, motivasi dan senantiasa mendoakan dan menantikan keberhasilanku.
2. Adiku tersayang Moulis Hanida, adik sepupu Rahma Juwita Dan Rafel serta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat untuk mencapai keberhasilanku
3. Teman-teman seperjuangan siyasah D14, rekan Kkn, dan keluarga kecil kosanku, Rika Paramita, Suwaybatul, Yesi Angraini, Nani Sartika, RiaAstuti yang selalu saling memberikan motivasi.
4. Sahabatku Iis Tyarini, Eva Susilo, Eis Siti Rokayah.
5. Seluruh dosen yang memberikan ilmunya semoga bermanfaat bagiku dunia akhirat.
6. Serta almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Masmita lahir di Way Kanan pada tanggal 4 Juni 1996. Anak pertama dari dua saudara dari pasangan bapak Hariyadi dan ibu Neldawati. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri Rebang Tangkas selesai pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan pada Mts Raudhlatul Muta'allimin Kasui lulus pada tahun 2011, dilanjutkan sekolah MA Raudlatul Muta'allimin 2014.

Pada 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat keluarga dan pengikut-NYA yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum tata negara (siyasah syar'iyah), program strata satu (SI) Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis masih menyadari terdapat banyak sekali kekurangan maupun kekeliruan, ini hanya semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr.H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S. Ag, selaku dekan fakultas syari'ah UIN raden intan lampung

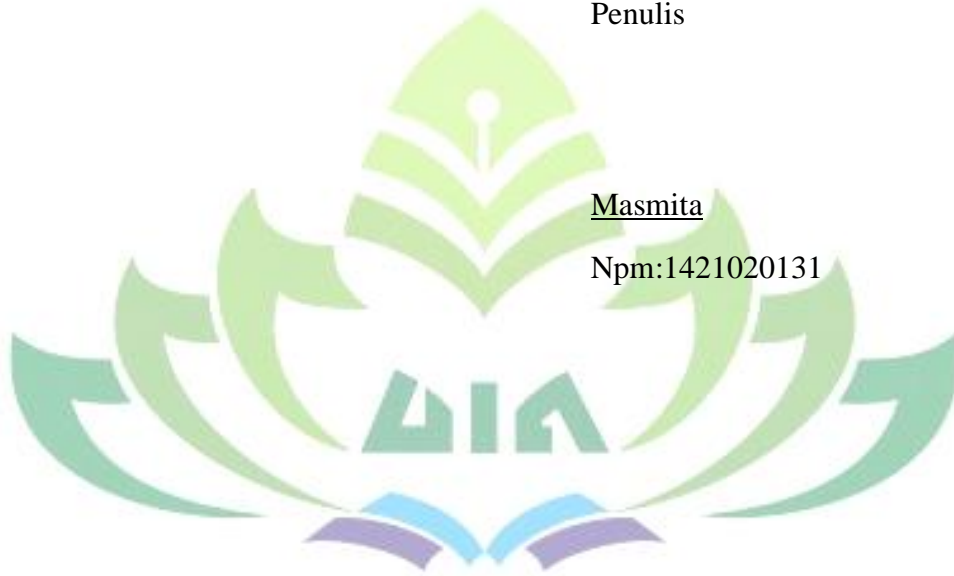
3. Drs. Susiadi As., M. Kom.I, selaku ketua jurusan siyasah UIN raden intan lampung
4. Drs. Maimun,S.H., M. H. selaku pembimbing satu yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Agustina Nurhayati, S. Ag. M.H. selaku pembimbing II yang banyak memberikan arahan, pikiran, ilmu dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan, staff dan kariyawan fakultas syari'ah UIN raden intan lampung dan telah memberikan pelayan dengan baik.
7. Kepala desa, tokoh masyarakat,panitia pemilhan dan warga masyarakat beringin jaya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kedua orang tuaku, adikku moulis serta sahabatku The 5 ASP terima kasih doa, dukungan dan semangat. semoga allah senantiasa membalasnya dan memberikan berkah kepada kita semua
9. Sahabat seperjuangan terkhusus Siyasah D14, Yuna, Ori, Reska, Ulfi, Widi, Caca, Juju, Wilda, Lia, Mae, Huda, Ali, Enggi, Dede, Riski,Budi, Tolib, Eksa, Angga, Kris dan masih banyak lagi yang lainnya dan tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa memberi semangat dalam menggapai cita-cita SH di kampus tercinta ini.
10. Rekan-rekan Kkn 40MR, dan untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pendidik dan masyarakat luas, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung 2018
Penulis

Masmita

Npm:1421020131



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II ETIKA DEMOKRASI DALAM FIQH SIYASAH DAN ETIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Etika dan Demokrasi Dalam Fiqh Siyasah	19
1. Pengertian Etika dan Demokrasi	19
2. Dasar Hukum Etika Demokrasi	23
3. Etika dan Demokrasi Dalam Islam	26
4. Pendapat Para Ahli Siyasah Tentang Demokrasi.....	31

B. Etika dan Demokrasi di Indonesia	34
1. Pengertian Etika dan Demokrasi di Indonesia	34
2. Dasar Hukum Etika Demokrasi di Indonesia.....	38
3. Etika dan Demokrasi di Indonesia	41
4. Pendapat Para Ahli Hukum Tata Negara Indonesia.....	51

BAB III DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Desa Beringin Jaya	54
B. Pelaksanaan Praktik Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya	62

BAB IV ANALISIS

A. Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan	75
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat	53
2. Luas Desa	54
3. Batas Desa	55
4. Jalan Desa	55
5. Ekonomi Masyarakat	56
6. Profesi	56
7. Produk Domestik.....	57
8. Gedung Sekolah	58
9. Pendidikan	58
10. Wajib Belajar 9 Tahun	59
11. Kesehatan Masyarakat	59
12. Penduduk.....	60
13. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa.....	60
14. Kompleks Balai Desa.....	61
15. Sarana Umum.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan di uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan). Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil peninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).³

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.⁵

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (*akhlak*).⁶

³Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h.105

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* , (Jakarta : Prenadamedia Group,2014), h.4

⁵ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karaya Ilmu (Jakarta : 1992), h. 78

⁶ Supriyadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.7

Demokrasi adalah bentuk dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of people*) di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat di lakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang secara langsung dan secara bebas.⁷

Pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih.⁸

Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.⁹

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)”, adalah upaya untuk melihat implementasi etika demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Ditinjau Dari Sudut Fiqh Siyasah.

⁷ A. Ubedillah Dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Pancasila, Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), h.66

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat* (Jakarta : Gramedia:), H.875

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kelurahan Dan Kecamatan* (Bandung : Focus Media, 2014), h.

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Teradap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)” adalah sebagai berikut :

1. Alasan objektif

Kedudukan kepala desa sangat urgensi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa, oleh karena itu dibutuhkan kepala desa yang kapabel mempunyai visi dan misi yang baik karena itu, dalam proses pemilihan kepala desa mesti dilaksanakan berdasarkan etika demokrasi yang tepat dan layak. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

2. Alasan subjektif

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena adanya relavansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan di mana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara menegakan *rule of law* adanya pemerintahan mayoritas dan menghormati hak-hak minoritas.¹⁰

Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan berserikat dan pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara *persuasive* (tidak memaksa). Pelaksanaan pemilu harus merujuk pada azas demokrasi yakni UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu dapat ditemukan dalam hal menimbang romawi I. umum angka 3. Disebutkan bahwa pelaksanaan pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun pengertian azas demokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

2) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Penghantar Ilmu Adat*, Edisi Revisi (Bandung :CV Mandar Maju,2014),h.163

warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan.

4) Rahasia

Rahasia memberikan suaranya, pemilih di jamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemilihan, peserta pemilu, pegawai pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.¹¹

¹¹Ungang-Undang Dasar 1945

Pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 Pasca perubahan. Pelaksanaan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah (pemilukada) harus senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yakni Pancasila yang kedua “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”, yaitu proses demokrasi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang beradab sehingga terwujud keharmonisan dan pemerintahan negara yang demokratis. Selanjutnya Pancasila mengatur kehidupan berdemokrasi dalam batang tubuh UUD 1945. Hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis yaitu harus senantiasa memegang teguh prinsip konstitusionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yaitu “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.¹² Prinsip demikian merupakan wujud penguatan berdemokrasi dan pembangunan sistem etika, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Artinya, apabila pelaksanaan pemilu telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maka pelaksanaan hasil pemilu perlu ditinjau ulang sehingga sesuai dengan prinsip berdemokrasi yang dibangun dalam UUD 1945 sebagai generalisasi dari Pancasila yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Upaya untuk mengatasi berbagai kecurangan dalam pemilu, UUD 1945 mengatur pelaksanaan pemilu demokratis, yaitu untuk menjaga konsistensi prinsip konstitusionalisme agar pelaksanaan pemilu tetap

¹²<https://yogamartha.wordpress.com/2012/10/02/pancasila-sebagai-sistem-etika-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-di-indonesia/> Diakses pada 13 febuari 2018 pukul 19:38

berdasarkan pada koridor hukum yang senantiasa menjunjung tinggi etika berpolitik.¹³

Etika ialah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Kesusilaan, yaitu keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Dengan kata lain kesusilaan menanamkan wajib dan darma. Kesusilaan mengatur manusia dan masyarakat agar tidak semaunya berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Manusia dibentuk oleh kesusilaan. Ini berarti bahwa kehidupan alaminya, seperti nafsu, kecenderungannya, cita-citanya dan sebagainya, seolah-olah disalurkan atau tertuang kedalam suatu bentuk tertentu. Manakala seseorang memenuhi syarat-syarat kesusilaan itu, perilakunya dan dia sendiri disebut baik (dari segi kesusilaan), dalam hal sebaliknya dikatakan buruk (dari segi kesusilaan).¹⁴ Namun istilah etika dan moral sering tidak bisa dibedakan secara jelas oleh karena itu moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku, jadi etika dan moral mempunyai obyek yang sama yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk ditentukan posisi baik dan buruknya. Namun etika dan moral mempunyai perbedaan, dengan demikian tolak ukur yang digunakan dengan moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Moral

¹³Hamdan Zoelva. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/>, diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.48 WIB.

¹⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.38

merupakan aturan-aturan normatif yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu.¹⁵

Pemilu (pemilihan umum) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Secara umum pemilu dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan presiden (pemimpin negara) hingga tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa. Pemerintahan desa selama ini memang menarik untuk di cermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realita pemilihan kepala desa yang masih di anggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karna dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 34 menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

UU pemerintahan desa adalah UU No. 32 tahun 2004, begitu pula UU No. 22 Tahun 1999 sebelumnya, telah mengatur kedudukan sistem pemerintahan desa. Sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa, UU ini telah mengakui desa sebagai wilayah yang otonom, yang sangat di marjinalkan sebelumnya oleh UU No. 5 Tahun 1979. Pengakuan tersebut termasuk dari wilayah adat seperti Nagari Di Sumatra Barat,

¹⁵ *Ibid.* h.41

Gambong Di Provinsi NAD, Lembung Di Sulawesi Selatan, Kampung Di Kalimantan Selatan, Dang Negeri Di Maluku. Desa mempunyai wewenang yang mencakup antara lain wewenang yang sudah ada menurut adat istiadat, mengatur wewenang kabupaten yang di serahkan kepada desa, menjalankan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, hingga menjalankan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Sebagai upaya untuk membangun demokrasi tingkat desa, UU baru ini dengan tegas memisahkan lembaga eksekutif desa (kepala desa) dengan lembaga legislative desa (badan permusyawaratan desa).¹⁶ Dengan di undangkanya Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Desa, sebagi sebuah kawasan yang otonom memang di berikah hak-hak istimewa, diantaranya keuangan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Dalam kehidupan sehari-hari kata etika sering disamakan dengan akhlak, karna sama-sama membahas kriteria baik dan buruk (*right and wrong*). Jika kita merujuk pada isi kandungan Al-Qur'an, ternyata ada sekitar 500 ayat yang membicarakan tentang konsep atau ajaran etika. Hal ini menyatakan betapa pentingnya etika dalam sistem kehidupan manusia. Etika yang di ajarkan Al-Qur'an mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Teladan yang menjadi contoh konkret dalam bidang etika adalah langsung Nabi Muhammmad SAW (Al-Ahzab:21 Dan Al-Qolam : 4).

¹⁶Iskandar syukur, *al-adadalah jurnal politik,hukum, dan kebudayaan* ,vol 7 No.1 juni 2008, (Bandar lampung : gedung fakultas syari'ah,2008), h.887

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.(Q.S Al-Ahzab :21)¹⁷

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (Q.S Al-Qalam : 4)¹⁸

Karena dalam etika tidak saja merupakan ajaran yang bersifat konseptual saja, tetapi juga dilengkapi dengan praktik.¹⁹ juga mengajarkan pentingnya menerapkan demokrasi dalam masyarakat. Demokrasi dalam dinamakan “syura”. Kata *syura* berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Dipongoro, 2010), H.420

¹⁸ *Ibid*, H.564

¹⁹ Arsyad sobby kesuma, *etika politik dalam dan aplikasinya di Indonesia*, Bandar lampung : institute agama negeri raden intan lampung, 2009), h.3

Dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran : 159 Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ^ص

Artinya : ... “maka maafkalah mereka dan memohon ampunlah kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam memutuskan suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat dengan keputusan tersebut maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.(Q.S Ali-Imran :159)²⁰

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan bagi umat Islam dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada umat , agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat.²¹

Setidaknya terdapat tiga pandangan Islam tentang demokrasi. *Pertama*, pandangan Ali Ghufuran alias Mukhlis, yang banyak dikagumi dan diikuti para tokoh, terutama setelah dieksekusi, telah menilai pemerintahan Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia kafir. *Kedua*, melihat demokrasi tidak sepenuhnya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam, diantara mereka adalah Yusuf Al-Qordhawi Syekh Jasim Al-Yasin, Syaeh Hasn Al-Banna Dan Syaeh Muhammad Abu Zahrah. *Ketiga*, mereka yang memandang demokrasi

²⁰ *Op.Cit*,H.71

²¹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*, (Jakarta : prenadamedia group,2014), h.214

adalah halal dalam segala kondisi, dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat pertentangan tidaknya dengan syari'at.²² Namun keyakinan Islam adalah rahmatan lilalamin, maka penegakan syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan adalah mutlak bagi setiap muslim. Muslim harus tunduk pada setiap aturan agama dalam apapun aktifitas hidupnya, termasuk dalam menjalankan sistem kenegaraan.

Maka dari itu memasuki wilayah politik yang berkembang saat ini mungkin perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat Islam. Namun pertimbangan utama dalam memasukinya adalah keterlibatan dalam politik (siyasah) adalah untuk mengubah sistem siyasah yang sedang berkembang saat ini (*secular*) menuju ke siyasah yang Islami.²³ Pada dasarnya konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Hal ini ditunjukkan dengan :

1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.
2. Rakyat di beri kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya.
3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah.
4. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah.
5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihad bukan persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al-Qur'an dan sunah.
6. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.

²²Muinudinillah Basri, *Hukum Demokrasi Dalam* , Jurnal Risalah , Suhuf, Vol.27, No.1, Mei 2015, h.1

²³*ibid*,h.19

7. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga.

Pengangkatan kepala desa sama halnya dengan dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Namun dalam praktiknya tidak mudah terselenggara karna ada *money politic*, intimidasi, petugas TPS tidak netral, merusak kertas suara, dan *ghost voter* (menggunakan hak pilih bukan atas dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih). Seperti yang terjadi di desa Beringin Jaya Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan terdapat ketegangan pada saat pemilihan kepala desa, dikarenakan penduduk desa tetangga ikut berbondong-bondong menyaksikan pemilihan hingga pemungutan suara, hinga terjadi kesalah fahaman antara pendukung kandidat yang satu dan yang lain. Karena berbeda paslon yang mereka dukung. Hal ini membuat spekulasi sudahkah terimplementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan?

2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Beringin Jaya Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan secara konseptual.
2. Untuk menganalisis implmentasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Beringin Jaya Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan ditinjau dari Fiqh Siyasah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁴Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa dan fiqh siyasah. Jadi untuk mendapatkan

²⁴ Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Jakarta : Sumbangsi, 1975), h. 2

informasi tentang etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangaka Kabupaten Way Kanan, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan pemilihan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Rebang Tangkas secara bebas dan terpimpin. Bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.²⁵ Penulis menganalisis tentang implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa dalam tinjauan fiqh siyasah (studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas).

2. Sampel

Sampel adalah contoh representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.²⁶ Tujuan penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh

²⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 148

keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *random sampling* yakni pengambilan sampel secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi, sehingga memberikan peluang yang sama setiap anggota populasi.²⁷

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dari tokoh masyarakat, kepala desa, masyarakat dan panitia pemilihan kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa secara umum dan , Al-Qur'an serta Undang-Undang yang berkaitan..

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya

²⁷ Sst, kasmadi, panduan modern penelitian kuantitatif, (bandung : alfabeta, 2014), h.66

(pewawancara) dengan penjawab (reponden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.²⁸ Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang implemenntasi etika demokrasi terhadap pemilihan kepala desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini : 1). Kepala Desa 2). Panitia Pemilihan 2 orang 3). Tokoh Masyarakat 2 orang 4). Masyarakat 4 orang

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

5. Tehnik Pengolaan Data

a) Editing adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.

b) Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori.

²⁸ Suharsisni Arikunto, *Prosedur Peneliian Lapangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.102

c) Sistematisasi data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.²⁹

6. Analisis Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridisatau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis induktif.

Metode induktif, yakni analisis yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁰ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan yang ditinjau dalam pandangan fiqh siyasah.

²⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode-Metode Penelitian*, Cet.Kesepuluh, (Jakarta :Bumi Aksara, 2009), H.155

³⁰Kaelan, M.S,*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradikma, Yogyakarta, 2015,h.

BAB II

ETIKA DEMOKRASI DALAM FIQH SIYASAH DAN ETIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Etika dan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Etika dan Demokrasi

Menurut Abul Haq Anshari dalam *Islamic Ethis: Concepts And Prospects* bahwa sesungguhnya etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang mandiri tidak pernah ada pada hari ini. Menurutnya kita tidak pernah menjumpai karya-karya yang mendefinisikan konsepnya, mengambar isu-isunya dan mendiskusikan permasalahannya. Apa yang kita temukan justru diskusi yang dilakukan oleh baerbagai kalangan penulis, dari kelompok filosof, teolog, ahli hukum Islam, sufi, dan teoretasi ekonomi dan politik dibidang mereka masing-masing tentang berbagai isu , baik yang merupakan bagian dari keilmuan mereka atau relevan dengan etika Islam.³¹

Secara etimologi ahklak merupakan jamak dari kata *khulukun* yang yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat, dan tingkah laku. Sedangkan menurut istilah, ahklak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa pikir panjang dan renungan lagi.³² Menurut Ibnu Maskawih, aklak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan

³¹ Boy ZTF, Pranada, *Filsafat : Sejarah Aliran Dan Tokoh*, (Malang: UMM Press, 2003), h. 65

³² Azumardi Azra, Dkk, *Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi*,(Jakarta :Departemen Agama , 2002), h. 204

dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran.³³ Sedangkan dalam Wikipedia Indonesia etika Islam (bahasa Arab: Ahklaq Islam) “Adab dan Akhlak iyah” adalah etika dan moral yang dianjurkan didalam Al-Qur’an dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW, yang didalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya.³⁴ Disebutkan dalam Q.S Al-Qalam: 4 (sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung).

Pengertian etika tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma. Pembahasan yang berkaitan dengan konsep nilai (*value*) sebenarnya merupakan kajian yang sangat erat secara substansial dengan persoalan etika, oleh karea itu kajian dalam persoalan nilai ini biasanya mempertanyakan apakah yang “baik” dan “yang buruk” atau seorang mesti berbuat “baik” secara tujuan yang bernilai. Khusus dengan karekteristik yang terakhir ini menyetuh pula mengenai apa dasar yang menjadi pembenaran suatu keputusan moral etika disebut “baik” atau “tidak baik”.

Dalam hal memberikan batasan tentang ukuran baik dan buruk, sebagai cabang dari filsafat maka etika bertitik tolak dari akal fikiran yang murni, hal ini menyebabkan tidak berlakunya nilai-nilai agama, kenyataan inilah letak perbedaan yang mendasar etika secara umum dan etika Islam, dalam ajaran dikenal dengan ilmu

³³ Ibn Miskawih, *Tahzib Al-Ahklak Wa Tathir Al-A'ara*, (Mesir : Al-Mashriyah, , 1934), hlm,40

³⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Etika> , diakses tanggal 10 Mei 2018

ahklak yakni: “suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal fikiran yang lurus.”³⁵

Menurut Hasbullah Bahri, memperinci etika Islam sehingga jelas perbedaannya dengan etika Filsafat. Perbedaan ini merupakan karakteristik etika Islam, perbedaan ini terdiri dari lima karakteristik etika Islam yakni:

1. Etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan, merupakan ajaran Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulnya.
3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif dapat di terima oleh seluruh umat manusia disegala waktu dan tempat.
4. Dengan ajaran-ajaran yang praktis, cocok dengan fitrah dan naluri dan akal dan fikiran manusia maka etika Islam dapat dijadikan seluruh manusia sebagai tingkah laku dan kehidupan sosial.
5. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang ahklak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT. Menuju keridhoanya dengan melaksanakan etika Islam niscaya selamatlah manusia dan fikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.”³⁶

³⁵ Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta, 1981, h.,4

³⁶ Hamzah Ya'kub, *Etika Pembangunan Ahklakulkarimah Suatu Pengantar*, (Bandung: CV Diponogoro,1981), h.14.

Berdasarkan pengertian diatas tujuan etika Islam adalah penyerahan diri kepada Allah, artinya segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia semata hanya mencari ridho Allah SWT. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan ketentraman hidup. Dari uraian tersebut dapat dimengerti, bahwa tujuan tertinggi dari etika Islam adalah untuk mencari ridho Allah, yang dilandaskan Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dengan demikian manusia mampu untuk menemukan suatu kebahagiaan yang kekal dan abadi yang merupakan wujud nyata dari janji Allah, maka keabadian tidak akan diraih apabila manusia itu sendiri memungkiri dari perintah-Nya.

Sedangkan etika Islam itu sendiri terbentuk oleh rukun iman dan rukun Islam melalui proses ihsan, dan hal itu akan melahirkan amal shaleh namun penulis simpulkan pengertian etika Islam adalah ajaran tingkah laku manusia yang secara sengaja atau dilakukan secara sadar dimana dilihat dari segi baik buruk sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh agama. Dalam konteks inilah keimanan sangat signifikan fungsinya menjadi dasar pijakan setiap tingkah maupun perbuatan. Karena keimanan sempurna akan melahirkan kesempurnaan ahklak. Dengan perkataan lain keindahan ahklak manifestasi dari kesempurnaan iman, tidak di pandang orang itu beriman dengan sungguh-sungguh jika aklaknya buruk.

Demokrasi dalam memang tidak ditemukan, karna memang demokrasi lahir di Dunia Barat bukan dari Islam. Namun, dalam Islam menemukan konsep *syura* yang mempunyai makna hampir sama dengan konsep demokrasi. Kata *syura* berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang

lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata *syura'* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura'* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.³⁷

2. Dasar Hukum Etika Demokrasi

Etika Islam dalam disebut dengan akhlak. Berasal dari bahasa arab *al-akhlak* yang merupakan bentuk jamak dari *Al-Khuluk* yang berarti budi pekerti, tabiat, dan watak yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai konsederan yakni perimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan. Etika dalam Islam dengan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Oleh karena itu kedua sumber tersebut merupakan sumber dasar hukum etika demokrasi yakni sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Qolam ayat 4 Allah SWT berfirman

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya :”sungguhny engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung”.³⁸ (Q.S Al-Qolam: 4)³⁹

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 214

³⁸ Al-Qura'an Terjemah, *Jabal*, Q.S Al-Qolam: 4, h.564

Ayat ini dinilai sebagai konsederan pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ini pula suatu pujian yang paling tinggi yang tidak ada taranya, di berikan Allah kepada Rasulnya Muhammad Saw. Walaupun secara fisik dan nalurinya sama dengan manusia biasa, tapi dalam kepribadian dan mentalnya bukanlah seperti manusia pada umumnya, karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi pemandu dan teladan bagi umat manusia seluruhnya.

Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.(Q.S Al-Ahzab: 21)⁴⁰

Ayat diatas menerangkan bahwa pribadi Rasulullah SAW adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan yang membentuk pribadi yang akhlakul karimah.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٢٦﴾

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*H.564

⁴⁰ *Ibid*,H.420

Artinya:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Ali-Imran:159)

Al-Qur'an surat as-syura' ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.(Q.S As-Syura:38)⁴¹

2. Hadist

Maka dari itu diperlukan kajian khusus mengenai akhlak ini yang sesuai dengan Al-Qu'an dan Hadis , karena dengan akhlak yang mulia seorang muslim akan meraih kesempurnaan dalam imanya Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (رواه الترمذی)

Artinya: Darinya juga, ia bercerita Rasulullah SAW bersabda “orang mukmin yang paling sempurna imanya adalah yang paling sempurna akhlaknya, dan orang

⁴¹ *Ibid*, H.487

yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya”.(H.R At-Tirmidzi).⁴²

Akhlak yang mulia dan mendorong manusia untuk berbuat baik kepada manusia dalam pergaulan sehari-hari mereka adalah salah satu tugas Nabi Muhammad saw. Yang paling penting seperti diketahui bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata “Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik ahklaknya”. (H.R Muslim)⁴³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَرٌ. (رواه الترمذي و ابو داود).

Artinya:” Dari Abi Hurairah ra. Berkata rasulullah SAW bersabda
“Musyawarah adalah dapat dipercaya”.(HR. At Tirmizi dan Abu Daud)⁴⁴

3. Etika Dan Demokrasi Dalam Islam

Kedudukan etika Islam dalam kehidupan manusia menempuh tempat yang penting sekali, baik sebagai individu atau sebagai masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangun dan kesejahteraan suatu bangsa tergantung bagaimna ahklak masyarakat

⁴² Thoha Ali Husain, *Asalib Tadris Al-Tarbiyyah Al-iyah*, (Bogor: Dar Assuruq, Cet. 2003,h. 151

⁴³ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid Iv*, (Semarang, Asy Syifa, 1993), H.173

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud jilid 3*, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.480

dan bangsanya. Apabila ahklaknya baik, akan sejahtera lahir dan batinnya namun jika ahklaknya buruk, rusaklah lahir batinnya.

Adanya nilai moral yang bersifat mutlak menunjukkan bahwa kebenaran nilai moral bereferensi kepada prinsip-prinsip normatif yang telah ditetapkan, sehingga nilai moral dalam kehidupan sehari-hari akan bersifat formalistik, objektif dan universal. Hal ini dihadapkan pada kondisi-kondisi partikulistik (berbeda-beda) yang memang diakui keberadaannya, maka sistem seperti ini tidak akan mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan partikulistik yang belum diatur dalam prinsip-prinsip moral yang ada. Tentu bagi penganut yang beragama Islam saat ini tidak ada jaminan selamat dari ancaman kehancuran ahklak yang sedang menimpa umat, kecuali kita memiliki konsep nilai-nilai konkret yang telah disepakati oleh Islam, yaitu nilai-nilai absolut yang tegak berdiri di atas asas yang kokoh. Nilai absolut akan mengantarkan kepada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat secara individual dan sosial, contoh:

1. Mempunyai komitmen dengan Allah dan tauhid dan akidah
2. Mempunyai komitmen dengan Allah dalam ibadah
3. Mempunyai komitmen dengan Allah dalam ahklakulkarimah
4. Mempunyai komitmen dengan Allah dalam keshalehan sosial.⁴⁵

Sistem demokrasi memang lahir dari dunia barat bukan dari Islam, karena sistem politik dalam Islam adalah berdasarkan *syura* (musyawarah). Namun, banyak

⁴⁵ Hasanudin Sinaga Zahrudin AR, *Pengantar Studi Ahlak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 86

sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah Islam untuk mencari titik temu antara dunia Islam dan barat menuju saling pengertian yang lebih baik berkenaan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi.

Pada awalnya Islam dalam tidak mengenal demokrasi, yang ada ditemukan dan mendekati kemiripan yaitu sistem *syura*. Demokrasi menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk dan untuk rakyat. Sebagaimana bentuknya demokrasi, *syura* juga diartikan dengan musyawarah. Dalam suatu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan bentuk dan suatu lembaga kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat seperti parlemen atau apapun namanya. Karna dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai *syura*, dan tidak juga dijelaskan secara rinci mengenai musyawarah. Hal ini diserahkan penuh kepada manusia dalam pemerintahan atau negara.

Kata “syura” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan penertian ini, syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.⁴⁶ Di Indonesia di artikan sebagai “musyawarah” yang memilki pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas menyelesaikan masalah.⁴⁷ Dengan

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 214

⁴⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 994

mengadopsi berbagai pendapat hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi kepentingan manusia.

Dasar kedua dari sistem kenegaraan , setelah keadilan dan *syura* atau musyawarah. Musyawarah bukan hanya sebuah pengakuan adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran dan praktik orang perorang sederajat.⁴⁸ Sistem kenegaraan yang dianjurkan oleh Islam harus memengan prinsip syura. Allah SWT telah mewajibkan berlakunya sistem syura kepada umat manusia dalam dua ayat Al-Qur'an⁴⁹ yaitu surah Ali-Imran 3: 159 dan As-Syura 42: 38.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya; “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Ali-Imran: 159).⁵⁰

Ayat ini mengajarkan kepada nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada seluruh ummat beliau, agar musyawarah dan memutuskan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam. Maksudnya urusan yang berkaitan dengan hal-hal duniawiyah saja, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dan ayat ini disampaikan dalam bentuk perintah terhadap Rasulullah SAW

⁴⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* , (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 329

⁴⁹ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik* , (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), h. 272

untuk menjalankan syura. Jika demikian, tentu umatnya lebih pantas untuk diperintah melakukannya.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S As-Syura :38)⁵¹

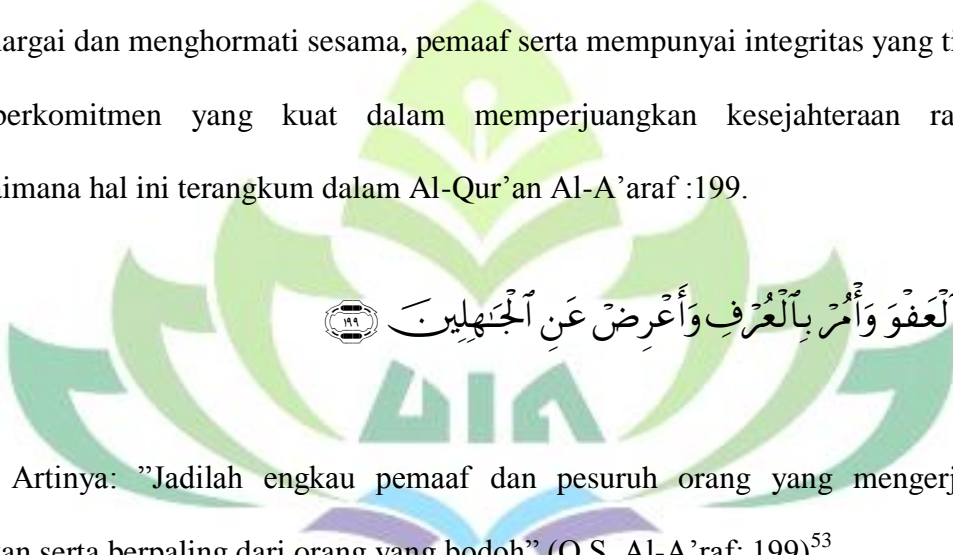
Sementara ayat yang kedua ini menerangkan bagaimana sifat utama dari kaum muslimin dalam menghadap berbagai persoalan dan memutuskan permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama lainnya dan saling tukar pikiran melalui syura.

Teks kedua ayat tersebut cukup jelas dalam mewajibkan untuk mengetahui prinsip syura. Dan seluruh ayat Al-Qur'an diatas menyatakan bahwa syura (musyawarah) disyaria'atkan dalam agama Islam, bahkan sebagian ulama' menyatakan bahwa syura adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Meski dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang musyawarah secara rinci seperti: masalah cara sitem, bentuk dan hal-hal lainnya seperti teknis. Itu diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Karena, Al-Qur'an menganut prinsip bahwa untuk menganut masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai

⁵¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op, Cit*, h.487

kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politi umat Islam. Maka Al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya.⁵²

Dalam bermusyawarah harus berperilaku dan bertutur kata lemah lembut, menghargai dan menghormati sesama, pemaaf serta mempunyai integritas yang tinggi dan berkomitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana hal ini terangkum dalam Al-Qur'an Al-A'raf :199.



خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan pesuruh orang yang mengerjakan kebaikan serta berpaling dari orang yang bodoh".(Q.S. Al-A'raf: 199)⁵³

4. Pendapat Ahli Hukum Tentang Demokrasi

Islam dan demokrasi memiliki persamaan dan perberbedaan. Oleh karena itu Islam tidak bisa menerima demokrasi dengan sepenuhnya dan tidak menolak secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada ditangan rakyat. Sedang dalam sistem Islam (*syura*) kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Dia-lah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang diatur oleh ketentuan Allah SWT.

⁵² Muhammad Iqbal, Op. Cit., h. 215

⁵³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, H.176

Menurut pandangan beberapa pemikir Islam tentang demokrasi dan di antaranya yaitu :

a). Nurcholish Madjid

Pemikiran politik Nurcholis Madjid tentang agama dan politik yaitu: “partisipasi sosial-politik bagi kaum muslim adalah berakar dalam ajaran agamanya, dengan bersangkutan dengan prinsip-prinsip tentang hak dan kewajiban masing-masing orang dalam masyarakat.”⁵⁴ Bagi Nurcholis Madjid, adanya kombinasi antara Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi yang dimaksud disini adalah menjadikan Tuhan, dalam pengertian ajaran-ajaran yang diturunkan yakni Islam. Sebagai sumber etika dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan politik.

Lebih lanjut Nurcholish Madjid berkeyakinan bahwa tanpa Islam, demokrasi akan kekurangan landasan keyakinan, nafas dan ruh. Sebaliknya, tanpa demokrasi Islam akan kesulitan untuk mewujudkan tujuan dasarnya sebagai sarana bagi kebaikan untuk semua. Demokrasi digagaskan oleh Nurcholis Madjid di sini bisa di sebut dengan istilah demokrasi religious yaitu penggabungan antara pemahaman *syura* (musyawarah) dengan demokrasi yang datang dari barat.

b). Abdul Hahmid Isma'il Al-Anshari

Menurut beliau dalam Muhammad Iqbal menyatakan adanya perbedaan yang mendasar antara *syura* dan demokrasi. *Pertama*, kekuasaan majelis *syura* dalam Islam terbatas sejauh tidak bertentangan dengan *nash*. Sementara demokrasi

⁵⁴ Muhammad Hari Zamharir, Agama Dan Negara “Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 166

menekankan kekuasaan mutlak manusia tidak mempunyai batas yang boleh dan tidak boleh dimusyawarahkan, sejauh anggota dan masyarakat kehendaki.

Kedua, hak dan kebebasan manusia dalam *syura* dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama. Dalam demokrasi orang boleh melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan.

Ketiga, *syura* dalam Islam ditegakan atas dasar akhlak yang berasal dari agama, sementara demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas.⁵⁵

c). Iqbal

Menurut pemikiran Iqbal modern barat pun keilangan sisi-sisi spritualnya. Hal ini megakibatkan praktik-praktik demokrasi barat jauh dari etika, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan. Iqbal melihat bahwa demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, mengabaikan keberadaan agama. Parlemen yang merupakan salah satu pilar yang dapat saja menetapkan salah satu hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kalau suara banyak anggota menghendaki. Demokrasi hanya mengakui rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak mengakui nilai-nilai wahyu. Selanjutnya karena memisahkan agama dan politik, demokrasi barat dijadikan sebagai alat untuk melakukan eksploitasi terhadap manusia. menurut Iqbal Islam jelas menolak segala bentuk otoritarianisme dan kediktatoran, namun Islam juga tidak menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spritualnya. Sebagai alternative Iqbal menekankan

⁵⁵ Abdul Hamid Isma'il, *Syura wa Atsaruh fi al-Dimuqrathiyah I*, Kairo: Mathba'ah Al-Salafiyah, 1980, h. 437-438 dikutip Dalam Muhammad Iqbal, *Ibid.*, h. 227

prinsip-prinsip demokrasi yang bisa disejajarkan dengan *syura* dan Islam. 1. Tauhid sebagai landasan asasi 2. Kepatuhan hukum 3. Toleransi sesama warga 4. Demokrasi Islam tidak terbtas oleh wilayah 5. Penafsira hukum tuhan harus dilakukan secra ijtihad.⁵⁶

d). T.M. Hasybi Ash-Shiddieqy

Menurut T.M Hasybi Ash-Shiddieqy tidak mengidentikkan demokrasi dan *syura*. Selain itu adanya persamaan dan juga perbedaan antara demokrasi dan prinsi-prinsip *syura*. Menurutnya, dengan rakyat dalam konsep demokrasi barat adalah warga negara yang dibatasi oleh geografis, yang hidup dalam suatu negara dan diikat oleh persamaan darah, bahasa dan adat-istiadat dan juga demokrasi menekankan kekuasaan mutlak rakyat, sehingga mengabaikan kekuasaan moral dan agama.⁵⁷

Pendapat Hasybi ini kelihatanya sama dengan pemikir Iqbal yang menyatakan demokrasi dan *syura* bukanlah dua hal yang identik sama, tetapi juga bukan pula sesuatu yang bertentangan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat apabila orientasi dan sitem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

B. Etika dan Demokrasi di Indonesia

1. Pengertian Etika dan Demokrasi di Indonesia

Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang filsafat yang tua sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku

⁵⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakrta:Bulan Bintang, 1981, H. 129-133 Dikutip Dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Prenada Group, 2014), h.226

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Prenada Group, 2014), h.224-225

manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Etika mempersoalkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lakukan, apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Jadi tugas utama etika adalah menyelidiki apa yang harus dilakukan manusia. Dalam etika dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, dan kewajiban. Etika bergerak di bidang intelektual, tetapi objeknya langsung berkaitan dengan kehidupan praktis.⁵⁸

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan tiga arti yang cukup lengkap tentang etika, yakni, a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), b) kumpulan asas nilai yang berkenaan dengan akhlak, c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.⁵⁹

Dalam pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat merumuskan pengertian etika. *Pertama* nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seorang atau kelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya. Contoh etika suku Indian, etika agama budha. Dalam artian ini, etika bisa pula dirumuskan sebagai sistem nilai yang berfungsi menjaga dan mengatur hidup manusia, baik perorangan ataupun bersama. *Kedua* etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Ini dimaksudkan dengan kode etik, misalnya kode etik advokat,

⁵⁸ E.Y. Kanter, *Eika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta : Storia Grafika, 2001), h.11

⁵⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op,Cit*, h.406

kode etik wartawan, dan sebagainya. *Ketiga*, etika dapat pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Dalam kaitan ini etika dapat pula dipahami sebagai ilmu jika asas-asas dan nilai-nilai tentang baik dan yang buruk dijelaskan secara rasional, kritis, sistematis dan dengan dukungan metode yang jelas.⁶⁰

Kata yang agak dekat dengan etika adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa latin *mos* (bentuk tunggal: bentuk jamak: *mores*), yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Maka secara etimologis, kata *etika* (bahasa yunani) sama dengan kata moral (bahasa latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. Adat istiadat ini merupakan konsep yang mencerminkan perilaku aktual anggota masyarakat tentang apa yang diizinkan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Konsep ini merupakan model-model dan patokan kelakuan yang dianut oleh anggota masyarakat. Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Hal ini dapat kita pahami manakala mendengar orang mengatakan “perbuatan tidak bermoral” ucapan itu memaksudkan bahwa perbuatan tersebut dipandang buruk atau salah karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶¹

Namun meski ada kesamaan antara etika dan moral, ada juga yang membedakannya yakni dengan demikian tolak ukur yang digunakan dengan moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Moral merupakan aturan-aturan normatif yang berlaku

⁶⁰ *Ibid*, h.11- 12

⁶¹ *Ibid*,h.4

dalam masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan demikian ajaran moral dan etika. Ajaran moral menuntun manusia sebagaimana seharusnya ia hidup, atau apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis, dan sistematis tentang sejarah dan moral. Etika menuntun manusia untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana ia bisa mengambil sikap yang bertanggung jawab bila berhadapan dengan berbagai ajaran moral.⁶²

Secara etimologis kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentuk dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang langsung secara bebas.⁶³

Secara termonologi, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah *government of the people, by the people, for the people*, yakni satu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁶⁴ Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya

⁶² *Ibid*, h.8

⁶³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h.66

⁶⁴ Tukiran Taniredja, Et. Al. *Pendidikan Keawarganegaraan Paradigm Terbaru Untuk Mahasiswa* (Bandung : Alfabeta, 2011), H.125

“inleiding in de vergelijkende staatrechtwetenschaap” perkataan demokrasi dari dua pokok kata yunani diatas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.⁶⁵

Demokrasi dapat dikonsepsikan bahwa rakyatlah yang berkuasa dan rakyat memiliki peran utama dalam proses sosial dan politik. Dan dalam pemerintah yang demokratis kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintah yang demokratis. Demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka wakil-wakil mereka yang pilih dibawah sistem pemerintahan bebas.”⁶⁶

2. Dasar Hukum Etika Demokrasi di Indonesia

Dalam penerapan demokrasi pancasila, tentu saja ada landasan hukum yang dipakai. Landasan hukum yang berfungsi sebagai landasan yang memperkuat status demokrasi pancasila dalam sitem politik Indonesia. Dan secara hukum penerapan demokrasi pancasila merupakan implementasi dari UUD 1945. Secara lebih rinci, berikut landasanya:

a. Proklamasi 17 Agustus 1945

Proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa menjadi landasan dari hukum demokrasi karena proklamasi berarti sangat penting bagi rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, proklamasi dianggap sebagai norma tertulis yang pernah ada setelah Indonesia berdiri sebagai suatu negara. Proklamasi ini juga menjadi wujud bahwa perjuangan rakyat telah membawa bangsa Indonesia kebabak baru kehidupan, dimana

⁶⁵ Nikmatul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), H. 200

⁶⁶ Tukiran taniredja, *Op. Cit.*h. 125

Indonesia sebagai negara baru akan memiliki tatanan hukum yang baru. Oleh karena itu, proklamasi yang mempresentasikan kemerdekaan yang direbut oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal inilah yang menginspirasi akan penerapan demokrasi sebagai istem pemerintahan, tentu saja yang bersifat pancasila.

b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam sejarah UUD 1945 pernah diganti oleh UUDS 1950. Hal itu Karena Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara. UUDS 1950 diterapkan pada tahun 1950-1959. UUDS dalah Undang-Undang Dasar Sementara yang terapkan untuk mengisi kekosongan selama peyusunan Undang-Undang baru untuk bentuk negara yang baru. Tetapi, tersendatnya penyusunan UUD baru dianggap mengancam situasi ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu, presiden mengeluarkan dekrit dimana isinya menetapkan bahwa UUDS tidak lagi berlaku dan Indonesia kembali kepada UUD 1945 sebagai konstitsi utama negara Indonesia yang membawa dasar-dasar dalam penerapan demokasi pancasila.

c. Supersemar (surat pemerintah 11 maret 1966)

Selain proklamasi 17 Agustus 1945 dan Dekrit presiden 1959, supersemar juga dianggap sebagai babak baru yang semakin memperkuat kekuatan pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan negara. Supersemar mengembalikan tatanan pemerintah Indonesia kepada pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dari hukum demokrasi pancasila.

d. Pembukaan UUD 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alenia ke-4, terdapat kalimat “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: ketuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosisl bagi seuruh rakyat Indonesia.

Dari pemukaan UUD 1945 tersebut telah jelas disebut bahwa landasan hukum demokrasi pancasila menitik beratkan pada jalannya demokrasi yang berlandas pada nilai kerakyatan yang dikandung oleh pancasila.

e. Pasal 1 ayat (2) UUDD 1945

Tercantum pada UUD 1945 pasal 1 yat 2 yang berisikan “kedaulatan ada di tangan rayat dan dilaksanan menurut Undang-Undang Dasar”. Sekali lagi konstitusi negara ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan dalam sistem politik. Hal ini karena Indonesia sangat mengutamakan kepentingan rakyat disbanding kepentingan pemimpin. Pemimpin hanyalah bertugas yang menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat atau dipilih oleh rakyat. Dengan kata lain, pemimpin juga abdi rakyat.

f. Pasal 28 UUD 1945

Pasal 28 dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk berkumpul bertukar fikiran mengeluarkan pendapat baik dengan tulisan, lisan ataupun bentuk lainnya. Hal ini dimaksud memberi akses pada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan

negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut juga dimaksudkan agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi dengan menerima dan mengoreksi kritik dari masyarakat. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah “kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan fikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.

g. Pasal 28E UUD 1945 Ayat 3

Rincian dari pasal 28 UUD 1945 sebagai landasan hukum demokrasi memberikan landasan tertulis yang lain dalam pasal 28E UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Tidak seperti masa kolonialisme bangsa asing saat rakyat harus melakukan pertemuan dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tidak berani menyuarakan aspirasinya, masa setelah kemerdekaan telah memberi kemerdekaan bagi rakyat untuk mengutarakan pendapat atau bermusyawarah dalam kelompok.⁶⁷

3. Etika dan Demokrasi di Indonesia

Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2.500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia.

Tempat pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik dalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian filsafat.

⁶⁷ [https:// groupppkn.com/landasan-hukum-demokrasi-pancasila](https://groupppkn.com/landasan-hukum-demokrasi-pancasila), diakses pada 15 mei 2018 pukul 15.00

Menurut Poespoproddjo, kaum Yunani sering mengadakan perjalanan ke luar negeri itu menjadi sangat tertarik akan kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan, hukum, tata kehidupan dan lain-lainnya. Bangsa Yunani mulai bertanya apakah miliknya, hasil kebudayaan negara tersebut benar-benar lebih tinggi karena tiada seorang pun dari Yunani yang akan mengatakan sebaliknya, maka kemudian diajukanlah pertanyaan mengapa begitu. Kemudian diselidikinya semua perbuatan dan lahirlah cabang baru dari filsafat yaitu etika.⁶⁸

Pengalaman bangsa Indonesia dalam era pra dan lengsernya Sueharto perlu dijadikan kasus untuk memahami peran etika dalam pembangunan dan perubahan sosial. Reformasi adalah gerakan untuk mencapai perubahan sosial di segala bidang. Ia digerakan sejak tahun 1998 untuk keluar dari krisis yang menimpa bangsa. Mulanya yang terjadi hanyalah krisis moneter, lalu merebak ke krisis ekonomi secara keseluruhan sehingga dirasakan fundamental ekonomi Indonesia yang dibanggaan ternyata keropos. Kemudian didasari pula bahwa krisis ekonomi juga disebabkan oleh krisis politik (negara diperintah secara diktator) dan krisis hukum (hukum dibuat untuk kepentingan penguasa, bukan untuk mewujudkan kepentingan).

Kemudian diakui pula bahwa semua krisis itu berasal dari krisis kepercayaan (kredibilitas). Penguasa dan pejabat tidak mendapat kepercayaan rakyat. Karena KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merajalela. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat amanah (*trust*) dan KKN adalah krisis moral. Krisis etika yang lainpun ikut

⁶⁸ Poespoproddjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), h. 18

berkembang pula, seperti pemalas, ceroboh, tidak disiplin, apatis, tidak bertanggung jawab, egois, mentalis menerabas (jalan pintas), penjilat dan munafik. Semua ini adalah kondisi sosial yang sakit parah pada era pra reformasi, dan tampaknya sakit ini belum juga pulih. Konflik berdarah antar etnik, agama dan golongan sekitar tahun 2000-an makin parah. Konflik Ambon, Sanggau Ledo, Sampit, dan Poso terjadi sekitar tahun 2000-an.⁶⁹

Kalau diperhatikan krisis- krisis etika di atas, tidak hanya ditemukan pada Pejabat yang korup, tetapi juga telah menular pada hampir lapisan masyarakat. Membuat kuitansi atau surat pertanggung jawaban (SPJ) palsu hampir ditemukan di setiap proyekdan kegiatan. Tidak suka kerja keras, tidak teliti, tidak mementingkan kualitas, suka melanggar peraturan, tidak berani menyatakan kebenaran, tidak punya inisiatif, merasa biasa dengan penipuan. Semua dapat dikatan sudah menjadi fenomenal sosial, penyakit masyarakat dan krisis mental bangsa.

Etika, moral atau akhlak adalah istilah yang ditunjukkan untuk aspek jiwa dan sifat prilaku. Seseorang atau suatu bangsa dapat dikatakan beretika, moral atau akhlak jujur misalnya, apabila dalam jiwa individu atau bangasa tertanam sifat jujur dan dapat disaksikan dalam perilaku nyata. Dengan demikian, keinginan untuk berperilaku jujur belum dapat dikatakan beretika jujur. Sese kali berbuat jujur (separti karena desakan situasi dan kondisi atau lainnya). Juga tidak dapat dikatan beretika jujur.

Untuk mencapai perubahan sosial dari serba krisis ke bangkitannya masyarakat Indonesia baru, masyarakat madani (masyarakat yang mandiri, kreatif,

⁶⁹ Bustanuddin Agus, *dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, h. 20

tidak tergantung kepada petunjuk dan ini sifat pemerintah), perlu dilakukan reformasi budaya, mentalitas dan moral untuk menghapus penyakit diatas dengan menggantinya dengan etika dan moral yang dapat dipercaya. Etika, moral dan akhlak tersebut adalah fondamen tempat berdirinya suatu bangsa. Tanpa fondamen ini bangsa manapun akan hancur. Dengan demikian, bersifat universal, diajarkan oleh setiap agama dan ideologi, serta diperlukan oleh bangsa manapun yang ingin merdeka dan mandiri.⁷⁰

Demokrasi di Indonesia, sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam empat periode: periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode 1998- sekarang.

a. Periode 1945-1998

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebelum sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.⁷¹

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi (perpecahan) politik berdasarkan afiliasi (kerjasama) kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik. Pada masa ini jarang dapat dipertahankan lama. Koalisi yang

⁷⁰ *Ibid.*, h.2

⁷¹ A.Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 140

dibangun sangat mudah dipecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi (tidak stabil) politik nasional bahkan mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Pesaing tidak sehat antara fraksi-fraksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintahan pusat telah mengancam berjalanya demokrasi. Faktor-faktor disintegratif diatas, ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam majlis konstituante untuk mencapai consensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong presiden soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden pada 5 juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, diganti oleh demokrasi terpimpin (*guided demokrasi*) yang memposisikan presiden soekarno menjadi pusat kekuasaan negara.

b. Periode 1959-1965

Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin (*guided democracy*). ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peran tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan lahirnya dekrit presiden 5 juli 1959 sebagai mencari jalan keluar dari kebutuhan politik melalui pembentukan pemimpin yang kuat. Sekalipun UUD 45 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengikat Ir. Soekarno sebagai

presiden seumur hidup. Artinya ketetapan ini membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 45.⁷²

Kepemimpinan tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar negara. Misalnya, pada tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dengan ungkapan lain, sejak diberlakukannya dekrit presiden telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden. Dalam pandangan sejarawan Ahmad Syafi'i Ma'arif demokrasi dipimpin sebenarnya menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam sebuah keluarga yang bernama Indonesia dengan kekuatan terpusat berada ditanganya. Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi dipimpin Soekarno yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yakni absoutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada control sosial dan *chek and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

Dalam kehidupan politik, peran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) sangatlah menonjol. Bersandar pada Dekrit Presiden 5 juli sebagai sumber hukum, didirikan banyak badan ekstra konstitusionil seperti Fron Nasional yang di gunakan oleh PKI sebagai wadah kegiatan politik. Fron Nasiaonal telah dimanipulasi PKI untuk menjadi sebagian strategi taktik Komunisme Internasional yang mengarahkan pembentukan Fron Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat.

⁷²*Ibid.*

Perilaku politik PKI yang berhaluan marxis tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh kalangan militer (TNI), yang juga komponen politik Soekarno yang penting. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik-ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal Gerakan 30 September 1965, pada peristiwa ini sejumlah pemimpin gerakan TNI dibunuh secara mengenaskan oleh kader PKI.⁷³

c. Periode 1965-1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Baru. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Orde Baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada Demokrasi Terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila. beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dihapus dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu.

Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang

⁷³ Ibid.h.142

layak bagi semua warga negara. *Ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa perlakuan dan perlindungan HAM, pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

Hal yang sangat disayangkan adalah, alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru baru sebatas retorika politik. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti yang dikatakan M. Rusli Karim, ketidak demokratisan penguasa Orde Baru ditandai oleh: 1. Dominan peran militer (ABRI), 2. Birokrasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, 3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik, 4. Campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan partai politik dan public, 5. Politik masa mengambang, 6. Monolitisasi ideologi negara, 7. Inkorporasi lembaga non pemerintah.

d. Periode 1998 – sekarang

Periode ini erat hubungannya dengan gerakan demokrasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekwen. Tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasila. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap Pancasila.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.* h.143

Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambah atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang hendaknya dikembangkan setelah jatuhnya rezim Orba adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel. Demokrasi yang diusung oleh gerakan Reformasi adalah Demokrasi yang sesungguhnya dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pada Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan Masyarakat Madani dan penegak HAM secara konsekwen dan sungguh-sungguh.⁷⁵

Etika demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai etika berpolitik yang berpegangan pada prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi. Etika demokrasi adalah bagian dari etika politik yang menempatkan demokrasi sebagai alat ukur etisnya. Kalau etika politik mempersoalkan faktor legitimasi yang menjadi dasar kekuasaan, sedangkan etika berpolitik lebih menekankan soal cara berpolitik. Masalah cara, pembuatan, atau tata laku untuk mengekspresikan sikap tindak politik dengan mengacu pada unsur nilai demokrasi inilah yang disebut sebagai etika politik demokrasi. Jadi etika demokrasi adalah cara berpolitik secara demokratis. Bagaimanakah cara berpolitik secara demokratis itu. Secara teoritis etika demokrasi adalah ajaran moral dalam bersikap tindak yang mengedepankan kehendak rakyat melalui penghargaan yang sama terhadap hak-hak untuk dapat bebas menyatakan

⁷⁵ *Ibid.* h. 144

pilihan dan pendapat. Etika demokrasi menekankan ekspresi politik yang menyuarakan (perbedaan) pendapat dengan tetap menghargai hak-hak kebebasan warga lain secara sama (tidak diskriminatif). Etika demokrasi menjunjung tinggi kesepakatan yang dibentuk dari suara terbanyak (mayoritas) melalui proses yang bebas tanpa tekanan dan kesamaan dalam hak dan kesempatan. Jadi etika atau ajaran moral politik dalam demokrasi itu menekankan tetap perlunya:

a. Apresiasi terhadap hak-hak kebebasan dan kesamaan dari warga (partisipasi) demokrasi lainnya. Hal ini berarti dalam proses interaksi sikap tindak politik tersebut tidak boleh ada pihak-pihak yang digunakan hak-haknya demi di atas hak-hak sekelompok warga lainnya,

b. Kejujuran dalam membuat kesepakatan adalah tuntutan demokrasi yang esensial. Rekayasa negatif, menggunakan kekerasan dan tekanan untuk membentuk pendapat umum secara paksa, penyuapan (*money politic*) adalah bentuk-bentuk pengingkaran terhadap etika demokrasi yang sesungguhnya,

c. Kesepakatan suara terbanyak yang lahir melalui kesamaan hak pilih yang bebas harus dapat dipatuhi sebagai hukum yang akan berjalan sebagai *rule of the game* bersama. Minoritas suara atau individu-warga tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah diproses melalui metodologi demokrasi (*majority rule*) yang absah.

Namun demikian tetap ada kewajiban bagi mereka yang memiliki legitimasi suara mayoritas untuk tidak menindas hak-hak asasi minoritas, d. dimensi moral dalam berpolitik, seperti sikap kesatria, *elegant*, *fairness*, jujur, memeng janji

(komitmen) santun adalah perilaku politik yang merefleksikan penghargaan terhadap hak-hak yang sama bagi kebebasan yang berbagi kebebasan bagi warga lainnya.⁷⁶

4. Pendapat Para Ahli Hukum Tata Negara

1. M. Durverger

Dalam bukunya "*les regimes politiques*" maka dalam artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisahkan.⁷⁷

2. Gaotama Mosca

Seorang ahli negara Italia, dalam bukunya "*the ruling class*" antara lain menguraikan bahwa:

- a. Bahwa demokrasi selalu terdapat *oligarchie*, yaitu golongan pemimpin-pemimpin tertentu yang merupakan sebagai "*elite*" atau golongan pemimpin yang berkuasa.
- b. Golongan *elite* itu merupakan *the ruling class* yang sebagai pemimpin-pemimpin yang berkuasa dan memerintah golongan dan rakyat lainnya.

Maksud pandangan gaotama mosca terhadap demokrasi yaitu, yang melaksanakan demokrasi adalah para wakil-wakil rakyat yang mereka pilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentinganya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan negara itu.⁷⁸

⁷⁶ Hendra Nurtjanjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 126

⁷⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Jara Wali Pers, 2013), h. 200

⁷⁸ C. S. K. Kancil, Chirtine S. T. , *Kansil, Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2008), h. 102

3. Prof. Dr. J. Barent

Dalam bukunya *ilmu politica* mengatakan:

- a. Negara hukum yang menerapkan demokrasi tidak boleh melampaui didalam penggunaan kekuasaannya itu, seperti melanggar hak-hak kemerdekaan perseorangan.
- b. Dengan menerapkan sistem demokrasi yang bertujuan agar masyarakat ikut serta dalam menjalankan kekuasaan.
- c. Diperlukanya pengawasan terhadap golongan *elite* yang menjalankan kekuasaan.

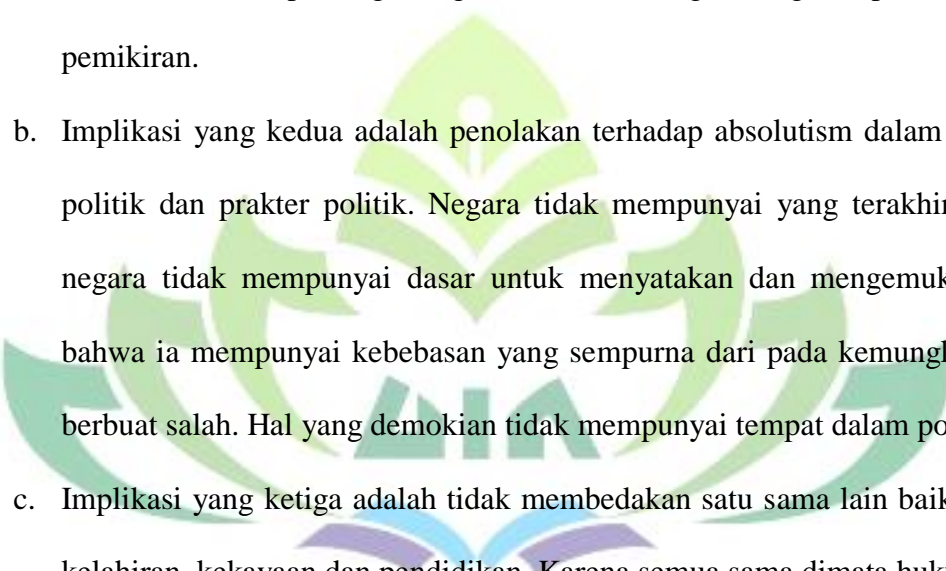
4. Moh. Mahfud MD

Dalam bukunya demokrasi dan konstitusi di Indonesia yang di sadur dari pendapat Hendri B.Mayo sistem yang menunjukan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁷⁹

5. R.H. Soltau

Dalam bukunya *an troduction to politics* menyebutkan dalam demokrasi terdapat beberapa implikasi yaitu:

⁷⁹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama 1993), h. 19

- 
- a. Rapat atau musyawarah adalah hal yang diutamakan. Karena dengan adanya perdebatan menemukan sebuah kebenaran. Karena dalam prinsip demokrasi setaiaap warga negara berhak mengembangkan pemikiran-pemikiran.
- b. Implikasi yang kedua adalah penolakan terhadap absolutism dalam teori politik dan prakter politik. Negara tidak mempunyai yang terakhir dan negara tidak mempunyai dasar untuk menyatakan dan mengemukakan bahwa ia mempunyai kebebasan yang sempurna dari pada kemungkinan berbuat salah. Hal yang demokian tidak mempunyai tempat dalam politik.
- c. Implikasi yang ketiga adalah tidak membedakan satu sama lain baik dari kelahiran, kekayaan dan pendidikan. Karena semua sama dimata hukum.
- d. Implikasi yang keempat ialah bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari suaatu kepercayaan bahwa cara untuk mewujudkan perdamaian ialah dengan cara pemberian tanggung jawab kepada manusia sebagai suatu keharusan yang wajar.⁸⁰

⁸⁰ Sukarana ,*Kekuasaan,Kediktatoran, Dan Demokrasi*, (Bandung: Alumni, 1974), h. 68-69

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Desa Beringin Jaya

1. Sejarah Desa Beringin Jaya

Desa Beringin Jaya adalah pemekaran dari Kampung Tanjung Kurung Induk Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, kemudian dimekarkan menjadi Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangakas Kabupaten Way Kanan pada bulan Mei 1992. Adapun sejarah pemerintahan tersebut yakni:

Nama-nama yang pernah menjabat kepala Desa Beringin Jaya

No	Nama Pejabat	Tahun Pemerintahan
1	Janim	1992 s/d 1997
2	Wasri	1997 s/d 1999
3	H. Paisol	1999 s/d 2012
4	Intan Komala	2012 s/d 2017
5	Nurman Hadi	2017 s/d 2023

2. Kondisi Geografis

Desa Beringin Jaya masuk wilayah Kecamatan Rebang Tangkas dengan luas wilayah desa Beringin Jaya 1100. hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 1617 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 1230 Orang di tahun 2018, namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam

yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis Desa Beringin Jaya berada di wilayah sebelah selatan Kabupaten Way Kanan. Keseharian masyarakat Desa Beringin Jaya adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak sapi, peternak kambing, dan peternak ayam dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Beringin Jaya masyarakatnya tergolong kedalam kelompok usaha pertanian.

Disepanjang jalan raya dan pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam padi dengan menggunakan acara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman padi terutama pada saat panen raya.

Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan sejauh 3 km dengan lama tempuh 15 Menit. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (Blambangan Umpu) sejauh 50 Km. dengan lama tempuh sekitar 1 Jam 15 Menit.

1. Gambaran Umum Demografis

a) Luas

No	Nama	Luas
1	Luas Desa Beringin Jaya	1100 Hk
2	Tanah Kas Desa	-
3	Bengkok Pamong	-
4	Komplek Balai Desa	17 M X 20 M
5	Tanah Kuburan	1 Hk

6	Tanah Lapangan	-
7	Sawah Masyarakat	5 Hk
8	Tegalan	254 Hk
9	Pekarangan Penduduk	254 Hk
10	Tanah Disbun/Povinsi	-

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Menurut tabel di atas luas memperlihatkan bahwa desa Beringin Jaya 1100 Hk.

b) Batas Desa

No	Nama	Batas
1	Sebelah Utara	Kampung Madang Jaya Kec. Rebang Tangkas
2	Sebelah Timur	Kampung Tanjung Kurung Kec. Kasui
3	Sebelah Selatan	Kampung Tanjung Kurung Kec. Kasui
4	Sebelah Barat	Kampung Lebak Peniangan, Gunung Sari Kec. Rebang Tangkas

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

c) Jalan Desa

No	Jalan Desa	Jumah
1	Panjang Jalan Kabupaten	-
2	Panjang Jalan Desa	5000 M
3	Jalan Tanah	4.500 M
4	Jumlah Jembatan Beton	1 (Depan) Unit

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Menurut data di atas menunjukkan panjang jalan 5000 m, panjang jalan yang masih tanah 4500 m.

d) Ekonomi Masyarakat

No	Nama	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja (15 – 55 th)	880 Orang
2	Jumlah usia sekolah (15 – 55 th)	507 Orang
3	Jumlah ibu rumah tangga (15 – 55 th)	385 Orang
4	Jumlah pekerja penuh (15 – 55 th)	400 Orang
5	Jumlah yang tidak menentu (15 – 55 th)	46 Orang
6	Jumlah rumah tangga petani	1057 Orang
7	Jumlah anggota rumah tangga petani	1057 Orang
8	Jumlah rumah tangga buruh tani	400 Orang
9	Jumlah anggota rumah tangga buruh tani	46 Orang

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa perekonomian masyarakat Beringin Jaya masih sangat rendah karena jumlah penduduk paling banyak adalah jumlah rumah tangga tani yakni 1054 orang dan jumlah rumah tangga buruh tani 400 orang.

e) Profesi

No	Profesi	Jumlah
1	Pedagang	10 Orang
2	Pengrajin	2 Orang
3	PNS	35 Orang
4	Penjahit	1 Orang
5	Montir	10 Orang
6	Sopir	20 Orang
7	Karyawan Swasta	6 Orang
8	Tukang Kayu	10 Orang
9	Tukang Batu	4 Orang
10	Guru Swasta	10 Orang
11	Tani	1054 Orang

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Mayoritas penduduk desa Beringin Jaya berprofesi tani atau buruh tani karena disekitar desa terdapat perkebunan karet, sawit, kopi dan tanaman lainnya.

f) Produk Domestik Desa

No	Nama	Jumlah
1	Tanaman padi tahun 2014 luas	4. Hektar
2	Tanaman Jagung luas	10 Hektar
3	Tanaman Cabe merah luas	2 Hektar

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Menurut tabel di atas nampaknya penduduk desa banyak menanam tanaman jagung dari pada menanam padi dan cabe.

g) Gedung Sekolah

No	Gedung Sekolah	Jumlah
1	TK	2 Unit
2	SD	1 Unit
3	SMP	1 Unit

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Di desa Beringin Jaya terdapat tiga jenjang sekolah yakni Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan memiliki empat unit gedung sekolah.

No	Nama	Jumlah
1	Jumlah Buta Huruf	53 Orang
2	Tidak tamat SD	300 Orang
3	Tamat SD	500 Orang
4	Tamat SMP	200 Orang
5	Tamat SMA	300 Orang
6	D.3	8 Orang
7	S.1	8

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Pendidikan pada desa Beringin Jaya ini diduga kuat masih sangat rendah karena kebanyakan penduduk hanya lulusan SD, bahkan terdapat 53 orang yang buta huruf.

h) Wajib Belajar 9 Tahun

No	Nama	Jumlah
1	Usia 7 – 15 Tahun	88 Orang
2	Masih sekolah 7 – 15 Tahun	88 Orang
3	Tidak sekolah 7 – 15 Tahun	15 Orang

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Anak-anak desa Beringin Jaya kelihatannya telah menjalankan wajib sekolah 9 Tahun walaupun belum sepenuhnya optimal.

i) Kesehatan Masyarakat

No	Nama	Jumlah
1	Rumah Tangga Menggunakan Sungai	100 KK
2	Poliklinik Kesehatan Desa	1 Unit
3	Bidan Desa	1 Orang
4	Balita	50 Orang
5	Balita Gizi Buruk	1 Orang
6	Balita Gizi Baik	50 Orang
7	Rumah tangga menggunakan air bersih/pipa	300 KK

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan kesehatan sudah berlangsung baik walaupun tidak sepenuhnya.

j) Penduduk

No	Nama	Jumlah
1	Jumlah kepala keluarga	410 KK
2	Jmlah penduduk	1523 Jiwa

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Menurut data di atas menunjukan jumlah seluruh penduduk desa Beringin Jaya 1523 jiwa dan 410 KK.

k) Jumlah Aparatur Pemerintah Desa

No	Nama	Jumlah
1	Perangkat Desa	23 Orang
2	BPD	7 Orang
3	RT	9 Orang
4	RW	4 Orang
5	LPMD	8 Orang
6	LINMAS	: 9 Orang
7	KPMD	-
8	FKPM	28 Orang

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Seluruh jumlah aparatur desa adalah 88 orang, aparatur yang terbanyak pada aparatur FKPM yakni 28 orang.

l) Kompleks Balai Desa

No	Nama	Jumlah
1	Bangunan Kantor Desa	20 X 25 M
2	Pendopo	6 X 10 M
3	Ruang Serbaguna	6 X 15 M

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

m) Sarana Umum

No	Nama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	5 Unit
2	Mushola	1 Unit
3	Jumlah Gardu Siskamling	4 Unit. ⁸¹

Sumber: Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2014

Menurut tabel di atas menunjukkan sarana umum yang terbanyak Masjid yakni ada 5 unit, Gardu Siskamling 4 unit dan yang paling sedikit Mushola 1 unit.

B. Pelaksanaan Praktik Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas

1. Implementasi etika demokrasi

⁸¹ Data Umum Desa Beringin Jaya Tahun 2017

Menurut Budi Sartono (ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa), etika dalam perpolitikan merupakan perwujudan sikap dan perilaku siapa saja yang terlibat dalam kancah politik. Dalam arti yang demikian calon kepala desa yang beretika adalah ia yang menjalankan etika dalam perpolitikan dan mempunyai keutamaan-utamaan moral. Keutamaan moral dapat dilihat dari sikap jujur, santun, memiliki sikap integritas, menghargai orang lain, menerima perbedaan dan pruralitas serta memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Memang benar dalam kehidupan berdemokrasi kebebasan masih terbuka dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) semakin tinggi namun semua harus dilakukan dengan penuh akhlak yang baik, beretika dan bertanggung jawab.

Pemilihan tersebut tidak hanya mencari kemenangan, melalui kekuatan dan kekerasan atau bahkan melakukan *black campaign* untuk memfitnah. Akan tetapi pemilihan yang berlangsung harus berakhlak dan beretika sesuai dengan nilai luhur bangsa. Itulah esensi etika demokrasi, suatu kebebasan yang dipagari oleh etika dan perangkat hukum yang harus dipatuhi.⁸²

Menurut Yusmin Kadafi warga masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas, etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun fiqh siyasah, yaitu ketika pemilihan secara langsung oleh seluruh masyarakat di desa tidak terdapat penyelewengan seperti

⁸² Wawancara, Budi Santoso, *Panitia Penyelenggara Pemilihan*, Beringin Jaya, Tanggal 1 Juni 2018

money politic, intimidasi, petugas TPS tidak netral namun pemilihan tersebut berlangsung secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, jujur dan adil.⁸³

2. Tahapan pemilihan kepala desa

Ada beberapa tahap dalam pemilihan kepala desa di desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan menurut bapak Suhardi sebagai panitia pelaksana pemilihan kepala desa sebagai berikut :

1) Pembentukan panitia pemilihan

Menurut Suhardi sebagai panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini di bentuk oleh badan himpunan desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perangkat yang lainnya.

2) Penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon

Menurut Suhardi sebagai panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon tata cara sebagian berikut:

- a. Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala desa 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan cara mengumpulkan berkas.
- b. Penjaringan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitia mengumumkan penjaringan bakal calon.
- c. Ketua panitia pemilihan menanda tangani berita acara penjaringan bakal calon.

⁸³ Wawancara, Yusmin Kadafi, Sebagai Warga Masyarakat, Beringin Jaya, Tanggal 3 Juni 2018

Setelah panitia memilih kepala desa melakukan hal tersebut maka panitia menyaring bakal calon yang memenuhi syarat.⁸⁴

Menurut Budi Sartono sebagai ketua panitia pelaksana, dalam proses penyaringan bakal calon, ditentukan syarat-syarat diantaranya:

- 1) Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan YME
- 2) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD1945, mempertahankan dan memelihara NKRI dan bhinika tunggal ika.
- 3) Photo copy ijazah dilegalisir
- 4) Photo copy akte kelahiran dilegalisir
- 5) Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai ka.kampung
- 6) Surat pernyataan domosili di pemerintah kampung
- 7) Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilih, tidak pernah dijatuhi hukuman yang paling sedikit 5 (lima) tahun dari keta pengadilan negeri
- 8) Surat keterangan berbadan sehat dari RSDU Way Kanan
- 9) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- 10) Visi dan misi apabila terpilih menjadi kepala kampung
- 11) Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala kampung untuk 3 (tiga) kali masa jabatan
- 12) Surat izin pencalonan kepala kampung dari penjabat Pembina kepegawaian dari calon ka. Kampung dari PNS

⁸⁴ Wawancara, Suhardi, Sebagai Panitia Pemilihan, Beringin Jaya, Tanggal 2 Juni 2018

- 13) Dokumen LKPI kepala kampung bagi ka.kampung incumbent
- 14) Surat keterangan putra daerah bagi calon ka.kampung yang berasal dari putra daerah
- 15) Pas photo berwarna 4x6 cm
- 16) Surat pernyataan pengunduran diri dari anggota BPK

Dari tahapan penjaringan bakal calon pilkades di desa Beringin Jaya hanya 4 (empat) orang yang memenuhi syarat, yaitu Intan Komala, Nurman Hadi, Andika dan Khairun Saleh. Dengan demikian hanya 4 (empat) orang inilah yang menjadi calon pilkades di Desa Beringin Jaya.

3. Pencalonan Kepala Desa

Menurut Ruslan sebagai tokoh masyarakat desa setempat pencalonan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa. Permohonan kepala desa diajukan kepala desa di ajukan secara tertulis kepada bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampiri persyaratan.⁸⁵

4. Kampanye

Menurut Nurman Hadi sebagai kepala desa terpilih. Kampanye dalam sistem demokrasi merupakan fase yang sangat penting di belahan bumi manapun sepanjang suatu negara penyelenggara pemilu yang menganut sistem demokrasi. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum.

⁸⁵ Wawancara, Ruslan Sebagai Tokoh Masyarakat Desa, Beringin Jaya, Tanggal 2 Juni 2018

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemimpin. Idealnya, sebuah kampanye yang baik itu kampanye yang menginformasikan keunggulan yang dimiliki partai atau tokoh yang menjadi kontestan dalam pemilu tersebut serta mampu memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Pemilihan kepala desa dipilih dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh badan perwakilan desa dan disahkan oleh bupati. Hal ini mewujudkan bahwa pengesahan oleh bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih kepala desa sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.⁸⁶

Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, tahapan pencalonan, tahapan kampanye hingga proses pemungutan suara.

Menurut ibu Fitriyani warga desa Beringin Jaya yang ia diketahui pada saat kampanye tentang visi dan misi dari salah satu calon kepala desa yakni ingin meningkatkan peraturan desa yang sebelumnya kurang berkualitas, memperbaiki infrastruktur yang selama ini terbengkalai dan membentuk kembali organisasi-organisasi desa seperti pemuda masjid dan pengajian ibu-ibu.⁸⁷

5. Pemilihan kepala desa

⁸⁶ Wawancara, Nurman Hadi Sebagai Kepala Desa Terpilih, Tanggal 1 Juni 2018

⁸⁷ Wawancara, Fitriyani Warga Desa, Beringin Jaya, Tanggal 3 Juni 2018

Menurut Budi Sartono sebagai ketua panitia pelaksanaan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia, pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, bebas, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal, hari, dan tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

6. Penetapan dan pengesahan calon terpilih

Menurut Budi Sartono setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, saksi-saksi dan seluruh calon kepala desa. Ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan kepala desa.

7. Pelantikan kepala desa terpilih

Menurut Budi Sartono sebagai ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih, kepala desa terpilih segera dilantik oleh bupati sesuai dengan petunjuk.⁸⁸

8. Berakhirnya masa jabatan kepala desa (persiapan pemilihan kepala desa)

Menurut Darmawan tokoh masyarakat. Badan Musyawarah Desa (BMD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam hal ini BPD memberikan peringatan berupa surat tentang akan berakhirnya masa jabatan

⁸⁸ *Ibid*, Sartono

kepala desa. BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.⁸⁹

Menurut bapak Murni masyarakat desa Beringin Jaya ada perubahan yang nyata setelah bergantinya kepala desa yang dahulu dengan yang sekarang yakni adanya pembangunan jalan, pemangunan ulang Balai Desa, membuat sumur bor, serta pembentukan siskamling.⁹⁰

Menurut ibu Zaliana warga masyarakat Beringin Jaya sistem pemilihan kepala desa Beringin Jaya kemarin di pilih langsung oleh penduduk desa sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang desa No 6 Tahun 2014 pasal 34 ayat 1 kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan ayat 2 pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Hubungan sosial kepala desa dengan masyarakatnya sangat dekat, mengayomi, terbuka, menjadi pendengar yang baik, serta menjadi panutan bagi masyarakat.⁹¹

9. Etika Demokrasi dalam Fiqh Siyasah Dan Etika Demokrasi di Indonesia

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci mengenai cara bermusyawarah namun hanya memberi garis besar saja, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat untuk menggunakan akal dan fikiran mereka. Sejauh tidak melanggar batas-batas yang ditentuka-Nya dalam Al-Qur'an. Agar prinsip syura ini dapat

⁸⁹ Wawancara, Darmawan, Sebagai Tokoh Masyarakat, Beringin Jaya, Tanggal 1 Juni 2018

⁹⁰ Wawancara, Murni, Sebagai Warga Desa, Beringin Jaya, Tanggal 3 Juni 2018

⁹¹ Wawancara, Zaliana, Sebagai Warga Desa, Beringinn Jaya, Tanggal 3 Juni 2018

berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah, setidaknya musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangan tiga hal, yaitu: masalah apa saja yang menjadi lapangan musyawarah, dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika musyawarah dilakukan.

Tentang cara melakukan etika musyawarah terdapat surat Ali-Imran 3: 159 barangkali dapat dijadikan sebagai rujukan. Ayat ini menunjukkan tiga sikap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan musyawarah. *Pertama*, berlaku lemah lembut. Sikap ini penting, terutama bagi seorang pemimpin. *Kedua*, pemberi maaf. Dalam musyawarah tidak menutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. *Ketiga* yang perlu diperhatikan dari ayat ini adalah hubungan vertikal dengan Allah. Musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampun kepada-Nya, supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua.⁹²

Konsep demokrasi memang muncul dari dunia barat tetapi nilai-nilai demokrasi itu ada didalam Islam. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah membangun Madinah dalam kurun waktu 12 Tahun. Keberhasilan itu terlihat setelah penduduk negeri diikat dengan sebuah Piagam Madinah. Apa yang kalian kenal dengan Piagam Madinah yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan umat di Madinah

⁹² Muhammad Iqbal, *Op.Cit.h* 218

merupakan konsep pertama didalam dunia mengenai demokrasi. Dalam pelaksanaan Piagam Madinah terdapat poin demokrasi yang harus dijunjung⁹³ yakni:

a. Nilai Persatuan dan Kesamaan

Penduduk Madinah terdapat golongan-golongan: 1. Kaum Muslimin 2. Kaum Muhajirin 3. Kaum Yahudi. Masing-masing kelompok keagamaan tersebut terdiri dari suku-suku dan sub suku. Mereka hidup berkelompok dan terpisah, maka dari itu tidak ada persatuan diantara mereka. Di Madinah Nabi Muhammad SAW bukan hanya memiliki sifat Rasulullah namun juga mempunyai sifat kepala negara. Muhammad juga menetapkan kebijakan politik yang dikenal Piagam Madinah, yang didalamnya terdapat kalimat-kalimat yang mengandung makna dan mengarah kepada kesatuan dan persatuan

b. Pembinaan Keamanan dan Peluasan Wilayah

Kesejahteraan masyarakat tergantung pada keamanan dan ketertiban sekitarnya. Di dalam Piagam Madinah juga banyak kalimat yang menunjukkan perlunya keamanan dan ketertiban ditegakan. Dalam pimpinan Muhammad SAW perluasan dan kekuasaan kaum muslimin jauh keluar Madinah makin aman dan penduduknya makin tentram. Keadaan demikian memantapkan stabilitas pemerintahan di Madinah.

c. Hukum dan Kebebasan Beragama

⁹³ Jimly Assihiddiqi, *piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945*, (Jakarta, sinar grafika, 2012), h. 136

Didalam Piagam Madinah juga berisi tentang hukum dan jaminan hak asasi. Pada pasal 25 Piagam Madinah disebutkan “ bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa Piagam Madinah memberikan jaminan kebebasan beragama. Muhammad SAW bukan hanya imam dalam sembayang tetapi juga hakim, panglima tentara, pemimpin tertinggi dalam semua aspek politik. pada awal perkembangannya merupakan kesatuan integral antara agama dan politik.⁹⁴

Etika demokrasi di Indonesia saat ini berkembang baik, karena ada kebebasan dalam berpendapat hal ini dapat dibuktikan dari bebasnya masyarakat dalam demonstrasi namun demonstrasi tersebut harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi perpecahan dan perkelahian. Lebih lanjutnya terdapat unsur-unsur sistem demokrasi:

- a. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi hal ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
- b. Pelaksanaan pemilu harus luber (langsung, bersih dan rahasia) dan jujur (jujur, dan adil) secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti

⁹⁴ Jimly A sshidqie, *Piajam Madianah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945*, (Jakarta: Grafika, 2012), h. 136

- c. Kekuasaan tertinggi di pegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah
- d. Karena sejalan dengan prinsip yang ketiga, dalam sistem demokrasi partai politik memainkan peran penting. Rakyat bebas mendukung partai mana saja yang sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
- e. Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada *check and balances* sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
- f. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk dibawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosial.
- g. Dalam demokrasi semua individu dan kelompok bebas melakukan perbuatan. Karena semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.⁹⁵

Demokrasi harus bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, serta untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, silang pendapat dan unjuk rasa tetapi demokrasi juga merupakan bagaimana cara dalam menyampaikan yang patut dan pantas sesuai dengan tempatnya. Sedangkan demokrasi sebagai etika ialah yang berkaitan dengan

⁹⁵ *Ibid*, h.221

peneguhan prinsip damai tanpa kekerasan, kebebasan dan kesetaraan toleransi dan sejumlah etika lainnya.



BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan ataupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai bab selanjutnya akan menganalisa data yang telah di kumpulkan, sebagai berikut:

A. Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan

Hasil observasi lapangan ditemukan Desa Beringin Jaya pada pemilihan kepala desa pada tahun 2016 yang lalu, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya memang sudah mengikuti pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran yang berarti. Walaupun terdapat dinamika sosial yang berimbas konflik sosial. Karena demokrasi adalah konsep yang paling baik diterapkan dalam sistem pemerintahan negara. Namun tetap menjunjung tinggi nilai etika. Karena dalam pemerintahan yang demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam menentukan undang-undang ataupun dalam memilih kepala negara. Apabila akhlak, dan etika ditinggalkan maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Poin-poin penting yang menjadi objek analisa adalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang meliputi :

1. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Menurut Budi Sartono sebagai ketua panitia pelaksana,⁹⁶ dalam proses penjaringan bakal calon, ditentukan syarat-syarat diantaranya:

- 1) Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan YME
- 2) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD1945, mempertahankan dan memelihara NKRI dan bhinika tunggal ika.
- 3) Photo copy ijazah dilegalisir
- 4) Photo copy akte kelahiran dilegalisir
- 5) Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai ka.kampung
- 6) Surat pernyataan domosili di pemerintah kampung
- 7) Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilih, tidak pernah dijatuhi hukuman yang paling sedikit 5 (lima) tahun dari keta pengadilan negeri
- 8) Surat keterangan berbadan sehat dari RSDU Way Kanan
- 9) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- 10) Visi dan misi apabila terpilih menjadi kepala kampung
- 11) Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala kampung untuk 3 (tiga) kali masa jabatan
- 12) Surat izin pencalonan kepala kampung dari penjabat Pembina kepegawaian dari calon ka. Kampung dari PNS

⁹⁶ Budi Sarono, Wawancara

- 13) Dokumen LKPJ kepala kampung bagi ka.kampung incumbent
- 14) Surat keterangan putra daerah bagi calon ka.kampung yang berasal dari putra daerah
- 15) Pas photo berwarna 4x6 cm
- 16) Surat pernyataan pengunduran diri dari anggota BPK

Mengenai persyaratan semacam ini dalam tinjauan fiqh siyasah jelas sangat berbeda karena persyaratan tersebut lebih banyak ke aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang dalam memimpin. Selain itu persyaratan penjangkaran bakal calon mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seseorang pemimpin, dalam ajaran Islam diajarkan bahwa syarat-syarat menjadi calon pemimpin adalah yang berdasarkan wahyu Ilahi, diantaranya adalah *amanah*, yaitu yang selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan suka berkhianat, *fathonah* yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki keilmuan, keterampilan memimpin, bijaksanan, *sidiq* yakni selalu benar dan jujur dan dapat dipercaya serta *tabligh* yaitu memiliki kecenderungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran .

Dari tahapan penjangkaran bakal calon pilkades di desa Beringin Jaya hanya 4 (empat) orang yang memenuhi syarat, yaitu Intan Komala, Nurman Hadi, Andika dan Khairun Saleh. Dengan demikian hanya 4 (empat) orang inilah yang menjadi calon pilkades di Desa Beringin Jaya.

2. Proses Kampanye Pilkades

Menurut Suhardi panitia pemilihan pilkades sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala daerah, proses pemilihan kepala desa menggunakan kampanye

sebagai saran untuk menjaring suara pemilih. Diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat di gunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah: pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepala umum, pemasangan peraga ditempat umum, rapat umum.

Disaat inilah terjadi ketegangan-ketegangan pada masyarakat yang disebabkan oleh kesalah pahaman terutama pada saat kampanye. Menurut perspektif Islam masalah kampanye memang tidak diatur secara gamblang hanya saja menjadi titik tekan adalah bahwa apapun bentuk setiap kecurangan yang dapat memecah belahkan persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Menurut pandangan Islam ketegangan dimasyarakat yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian yang jelas-jelas sangat dilarang sebaliknya dalam pandangan sukseksi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa proses pemilihan kepala desa Beringin Jaya dalam tinjauan fiqh siyasah tidak mengutamakan keterampilan, akhlak dan kemampuan seorang pemimpin dan itu bertentangan dengan syaria'at . Serta proses kampanye yang sering menjelek-jelekan dan menggunakan cara kotor bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam Islam.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan

Pelaksanaan pemilihan kepala desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa lainnya. Pemilihan kepala desa diberbagai daerah di Indonesia memang masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan kepala desa cenderung melakukan segala hal untuk menang dalam pemilihan. Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sering dijadikan alasan untuk mendepak etika dan moral di area politik. Dalam demokrasi, etika dan moral nampaknya sudah tidak menjadi pertimbangan.

Padahal kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi bukanlah kebebasan yang mengabaikan etika, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap menghargai harkat mertabat pihak atau kelompok lain, serta menghormati sesama anggota masyarakat. Dan bagaimanapun caranya para calon kepala desa harus berperilaku etis dalam aktivitas politiknya, bergaul dan menyampaikan pendapatnya, jujur, sopan, santun, dalam prilaku dan bertutur kata, menghargai dan menghormati sesama, pemaaf serta mempunyai integritas yang tinggi dan berkomitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana hal ini terangkum dalam Al-Qur'an Al-A'araf :199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: ”Jadilah engkau pemaaf dan pesuruh orang yang mengerjakan kebaikan serta berpaling dari orang yang bodoh”.(Q.S. Al-A’raf: 199)⁹⁷

Bahkan agama Islam adalah akhlak, orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya, rasulullah SAW bersabda: Yang artinya artinya: orang mukmin yang paling sempurna imanya adalah yang paling baik akhlaknya.(HR. Abu Dawud, tirmizi dan Ahmad). Serta meneladani rasulullah SAW karena Nabi kita Muhammad SAW merupakan teladan bagi umatnya QS. Al-Ahzab: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا ﴿٢١﴾ .

Artinya:” sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauadan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kimat dan banyak menyebut Allah.(QS. Ah-Ahzab :21)⁹⁸

Selanjutnya konsep syura juga diartikan dengan musyawarah, seperti dalam Al-Qur’an surah Ali-Imran 3:159 dan Asy-Syura 42: 38 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas.

⁹⁷ Departemen Agama Ri,*Op.Cit.* h 176

⁹⁸ *Ibid*,h. 420

Jadi didalam Islam mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi yakni disebut syura'. Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam apabila sitem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas. Dari berbagai pendapat mereka tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Beringin Jaya. Yaitu dalam menentukan kepala desa mereka menyelenggarakan pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat tanpa meninggalkan etika yang baik. Dalam pelaksanaan pelaksanaan pemilihannya, pemerintahan desa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi menurut peneliti, bisa dikatakan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi di Desa Beringin Jaya dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat di ambil kesimpulan.

1. Implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan sudah terwujud dan berjalan dengan baik. Kepala desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa, dan telah melaksanakan azas demokrasi yakni UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu dapat ditemukan dalam hal menimbang romawi 1 umum angka 3. Dan disebutkan bahwa pelaksanaan pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan melalui tahapan pemilihan kepala desa dari pembentukan panitia pemilihan, penjaringan penyaringan dan penetapan bakal calon, pencalonan kepala desa, kampanye, pemilihan kepala desa, hingga pelantikan kepala desa. Secara teoritis demokrasi sangat bagus namun secara aplikatif belum sepenuhnya dipraktikkan.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan sudah berjalan dengan baik, damai, adil dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah. Demokrasi dan syura bukanlah dua hal yang identik namun bukan pula harus di pertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sitem politik

umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas. Dan pelaksanaan pemilihan kepala desa ini menganut sistem demokrasi tanpa mengabaikan etika.

B. SARAN

1. Perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih meningkatkan lagi untuk mengawasi pemilihan kepala desa.
2. Perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani etika demokrasi.

Harapan penulis, masyarakat dapat menerapkan demokrasi yang diiringi etika sehingga menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaran Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid Iv*, Semarang, Asy Syifa, 1993
- Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Jakarta: Sumbangsi, 1975
- Al-Qur'an Dan Terjemah (Departemen Agama Republic Indonesia), Bandung : Diponogo, 2014
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Lapangan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Azumardi Azra, Dkk, *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*, Jakarta :Departemen Agama Islam, 2002
- Basri Muinudinillah, *Hukum Demokrasi Dalam Islam*, Jurnal Risalah, Suhuf, Vol. No. 1, Mei 2015
- Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Boy ZTF, Pranada, *Filsafat Islam: Sejarah Aliran Dan Tokoh*, Malang: UMM Press, 2003
- C. S. K. Kancil, Chirtine S. T. , *Kansil, Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2008
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, Jakarta : Gramedia, 1999

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

E.Y. Kanter, *Eika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta : Storia Grafika, 2001

Hamdan Zoelva. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. [Http://Hamdanzoelva.Wordpress.Com/2008/04/07/Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketata Negaraan-Ri/](http://Hamdanzoelva.Wordpress.Com/2008/04/07/Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketata-Negaraan-Ri/), Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16:48 Wib

Hasanudin Sinaga Zahrudin AR, *Pengantar Studi Ahlak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta, 1981

Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembangunan Ahklakulkarimah Suatu Pengantar*, Bandung: CV Diponogoro, 1981

Hendra Nurtjanjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008

Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Adat*, Edisi Revisi Bandung, CV Mandar Maju, 2014

Indonesia, *Undang-Undang Kelurahan Dan Kecamatan*, Bandung, Focus Media, 2014

Ibn Miskawih, *Tahzib Al-Ahlak Wa Tathir Al-A'ara*, Mesir : Al-Mashriyah, 1934

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Karya Ilmu, 1992

Jimly Asshiddiqie, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Kesuma Arsyad Sobby, *Etika Politik Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Bandar Lampung, Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2009

- Kartono Kartini, *Enghantar Metodologi Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996
- M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001
- Muh. Mahfud MD, *demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan IV, 1993
- Nikmatul Huda, *Ilmu Negara Jakarta* : Rajawali Pers, 2013
- Nurcholish Madjid”, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004
- Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999
- Sedarmayati, Syaifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Soyan Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Sukarana ,*Kekuasaan,Kediktatoran, Dan Demokrasi*, Bandung: Alumni, 1974
- Supriyadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Gradika, 2010
- Syukur Iskandar, *Al-Adalah Jurnal Politik, Hukum Dan Kebudayaan Islam*, Vol 7 No. 1 Juni 2008, Bandar Lampung, Gedung Fakultas Syari’ah, 2008
- Thoha Ali Husain, *Asalib Tadris Al-Tarbiyyah Al-Islamiyah*, Bogor: Dar Assuruq, Cet. 2003
- Tukiran Taniredja, Et. Al. *Pendidikan Keawarganegaraan Paradigm Terbaru Untuk Mahasiswa*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Ubedillah Dan Abdul Razak, *Pendidikan Dan Kewarganegaraan (Civil Education) Pancasila, Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Kencana Prenandamedia Group, 2014

[Yogamartha.Wordpress.Hhttps://Com/2012/10/02/Pancasila-Sebagai-Sistem-Etika-Dalam-Kehidupan-Berbangsa- Dan- Bernegara-Di- Indonesia/](https://com/2012/10/02/Pancasila-Sebagai-Sistem-Etika-Dalam-Kehidupan-Berbangsa-Dan-Bernegara-Di-Indonesia/) Diakses Pada 13 Februari 2018 Pukul 19:38

http://id.wikipedia.org/wiki/Etika_Islam, diakses tanggal 10 Mei 2018

[https:// groupppkn.com/landasan-hukum-demokrasi-pancasila](https://groupppkn.com/landasan-hukum-demokrasi-pancasila), diakses pada 15 mei 2018 pukul 15.00

